ROHANIAWAN TAK BOLEH BERPOLITIK?

Y.B. Mangunwijaya

Sumber: Majalah D&R, 7 Desember 1996 - Edisi 41/01 - 07/Des/1996

Demi perdamaian, kemerdekaan, dan nilai-nilai moral, kebenaran; demi tata hidup bersama yang menanamkan kerukunan dan persaudaraan, saling memekarkan dan yang membangun iklim budaya mulia, budi pekerti tinggi, yang menyemarakkan keindahan seni serta cita-rasa yang budiman, yang memupuk kesetiakawanan dan menumpas egoisme individualis maupun kolektivisme yang mencekik, serta penghapusan hukum rimba survival of the fittest. Itulah politik dalam arti asli kodrat alami, demi kehidupan dan penghidupan bersama yang sejahtera umum atau politik dalam dimensi moral (dan iman): politik moral dan iman.

Rohaniwan Tak Boleh Berpolitik?

Oleh Y.B. Mangunwijaya

Pada tahun 1945 dan selanjutnya, semua Kiai, pemimpin agama di Indonesia, termasuk Uskup A. Soegijapranata yang oleh Presiden Soekarno dianugerahi gelar pahlawan nasional, menyatakan jihad fisabilillah atau berjuang biasa membela RI, yang baru saja diproklamasikan, melawan Kerajaan Belanda. Jadi, benar-benar aktif dalam bidang politik. Demikian pun dalam konsolidasi RI sesudah pengakuan RI, oleh dunia internasional, khususnya dalam pergulatan melawan PKI, semua kiai dan rohaniwan Indonesia jelas aktif dalam bidang politik. Kini, Uskup Belo dikecam dengan alasan bukanlah tugas rohaniwan Katolik berpolitik. Mengherankan. Dalam pandangan Islam, berpolitik, juga oleh rohaniwan Islam atau kiai, wajar saja, bahkan sering keharusan, karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu pun bidang kehidupan yang di luar aktivitas Islam, termasuk karya politik.

Sebetulnya, dalam kalangan Katolik sama saja. Dengan argumentasi bahwa wilayah politik pun termasuk dalam aktivitas manusia normal, manusiawi, dan bahwa (istilahnya) Kerajaan Tuhan melawan kerajaan kegelapan dipergulatkan dalam medan politik juga. Maka, sebetulnya amat anehlah, bagi saya, heboh mengenai sikap Uskup Belo membela rakyat kecil Timor Timur (Timtim) -- atau sama sekali tidak aneh bila dilihat konteksnya. Tapi, marilah kita dengan pikiran dingin (hati bolehlah panas, maklumlah orang Nusantara) membincangkan masalah itu secara obyektif. Sebisa mungkin. Memang, ada dua paradigma dan pengertian dasar politik. Yang pertama lebih terkenal dan biasanya dikira satu-satunya, yakni politik dalam aspek kekuasaan: penyelenggaraan kekuasaan, pemilihan, pertahanan, perebutan, penikmatan, pelestarian, status-quo kekuasaan, dst. Pendek kata, segala yang menyangkut *power* atau *might*, kekuasaan: politik kekuasaan (PK). Termasuk kekuasaan mental, spiritual, rohani, agama, yakni yang berciri pemaksaan atau hegemoni kehendak oleh pihak yang lebih kuat kepada yang nisbi lemah. Lazimnya, khalayak ramai mengartikan politik melulu dalam arti pertama itu. Karenanya, ada ucapan yang terbang di mana-mana: "*politik itu kotor*".

Namun, bagi orang terpelajar, ada politik dengan paradigma kedua, yang sebenarnya lebih asli dan otentik, bisa ilmiah tetapi dengan praksis, ataupun sesuai kodrat alam manusia dan masyarakat (tetapi kurang populer), yakni politik dalam arti "*segala usaha demi kepentingan dan kesejahteraan umum*", jasmani dan rohani. Bukan untuk kepentingan golongan saya atau faksi dia atau partai itu atau umat agama tertentu,

tapi demi kepentingan dan kesejahteraan umum semua warga, bahkan universal, semua bangsa, tanpa pandang siapa dan golongan, partai, ras, agama, atau ideologi tertentu. Jadi, merupakan kesejahteraan dalam arti luas, misalnya Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; juga demi perdamaian, kemerdekaan, dan nilai-nilai moral, kebenaran; demi tata hidup bersama yang menanamkan kerukunan dan persaudaraan, saling memekarkan dan yang membangun iklim budaya mulia, budi pekerti tinggi, yang menyemarakkan keindahan seni serta cita-rasa yang budiman, yang memupuk kesetiakawanan dan menumpas egoisme individualis maupun kolektivisme yang mencekik, serta penghapusan hukum rimba *sunvival of the fittest*. Itulah politik dalam arti asli kodrat alami, demi kehidupan dan penghidupan bersama yang sejahtera umum atau politik dalam dimensi moral (dan iman): politik moral dan iman (PM).

Pasti Anda sepaham, selayaknya dan sewajarnya rohaniwan itu jangan ikut main dalam medan PK, yang sering memang kotor, tapi justru harus intensif dan memberi teladan dalam politik sejahtera umum yang berpijak pada moral dan iman (PM). Jadi, politik yang dilarang bagi rohaniwan, paling sedikit yang Katolik, yang dimaksud Menlu RI Alatas dan Menlu Vatikan mengenai Uskup Belo itu adalah PK dalam arti pertama tadi. Tapi, dalam PM, Uskup Belo tidak hanya boleh, tapi wajib dan diharuskan aktif. Dan, memang itu adalah pegangan umum bagi semua pastor, biarawati-biarawan, uskup, kardinal, bahkan paus sekalipun, dalam gereja Katolik. Dalam Islam, saya kira hampir sama juga. Memang, Nabi Isa mengajar ke para penganutnya demikian. Jangan pakai pedang, tapi lewat kebenaran, iman, harapan, cinta kasih.

Jadi, Menlu Ali Alatas dan Menlu Vatikan amat benar: rohaniwan jangan main dalam PK. Tapi, Uskup Belo amat benar juga. Sebab, yang dibela aktif oleh Uskup Belo, ya, justru dimensi PM tadi. Dan, itu diakui Pak Alatas: "*Kami (RI) mengakui hak Uskup Belo membela hak-hak asasi manusia serta hal-hal kemanusiaan lain*." Justru, di sanalah perjuangan Uskup Belo: membela hak-hak asasi manusia, keadilan, kemanusiaan, moralitas seumumnya, dan sebagainya, termasuk juga yang menyangkut tingkah laku aparat bersenjata RI terhadap penduduk Timtim, selama 21 tahun berkenalan dengan aparat RI. Atau, sebutlah oknum-oknum RI. Itulah yang dihargai Panitia Hadiah Nobel, *civil courage* dalam politik moral (dan akhirnya iman). Bahwa Uskup Belo dipersalahkan karena "*masuk dalam bidang politik*", nah, itu saya kira karena masyarakat umum mengartikan politik melulu hanya eksklusif dalam arti PK.

Demikian pun Hadiah Nobel Perdamaian tidak untuk mereka yang memperjuangkan kekuasaan pihak sini atau situ. Istilah perdamaian (*pax*, *peace*) di kalangan Nobel maklumlah luas, seperti yang saya uraikan di atas, meskipun tentu saja menyingung accidental wilayah PK. Tapi, esensinya selalu dalam wilayah pengertian PM. Tidak hanya perdamaian politis (moral) seperti yang diperjuangkan Yasser Arafat dan Begin; pasangan Menlu AS Kissinger dan Menlu Vietnam Le Duc Tho dulu, yang bersama-sama menemukan jalan untuk penyelesaian Perang Vietnam; atau ilmuwan nuklir Zakharov, yang merintis persaudaraan antara para ilmuwan Rusia dan

Amerika demi terhindarnya malapetaka mengerikan: perang nuklir; tapi juga seperti Uskup Tutu di Afrika Selatan yang apartheid, Aung San Suu Kyi, atau Rigoberta Minchu yang berjuang demi hak asasi kemerdekaan mengeluarkan pikiran, keadilan bagi kaum tertindas, demi nilai-nilai moral, perlawanan terhadap segala bentuk fasisme, kekerasan, penindasan serta kesewenang-wenangan, atau perlakuan tidak manusiawi, dengan syarat tanpa kekerasan.

Banyak orang Barat menuduh Arafat dan orang Timur mengutuk Begin memakai metode meriam atau terorisme. Tapi, akhirnya toh dua tokoh itu dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian karena, pada saatnya yang historis, mereka (seperti Mandela dan De Clerck di Afrika Selatan) secara spektakuler mampu menerobos dinding-dinding baja perang dan membuang peluru-peluru kekerasan untuk mencari perdamaian.

Begitu juga apa yang dijasakan oleh Uskup A. Soegijapranata dan para kiai Islam pada zaman revolusi, dan selanjutnya itu amat terkait dengan perjuangan politik kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap Kerajaan Belanda. Jadi, kebetulan, masuk bidang PK. Tapi, secara esensial-substansial, itu dilakukan demi pembelaan nilai moral universal dan "*Mukadimah*" UUD 1945, khususnya Sila Kedua dan Kelima Pancasila, *the right of self-determination* manusia-manusia yang terbelenggu oleh penindasan dan pengisapan. Jadi, esensinya adalah PM.

Mampukah kita sesekali melihat Timtim tidak hanya dari sudut PK, tapi dari sudut PM juga? Dan, yang paling sulit, dari pandangan manusia Timtim? Dalam bahasa Jawa, dengan hati yang tepo-seliro terhadap penduduk Timtim yang paling biasa, paling dina, paling miskin, paling kebanyakan? Penduduk sebagai manusia apa-adanya-mereka dan bukan sebagai subyek atau obyek PK, pembangunan, antikomunis, atau bujet sekian miliar, melainkan sebagai manusia Timtim: memandang manusia secara manusiawi?

Maka, esai ini sebetulnya juga hanya tertuju kepada pembaca yang dapat tepo-seliro dengan rakyat dina, lemah, miskin, kebanyakan, yang ada di mana-mana: yang sanggup menghayati empati dan simpati terhadap rakyat kecil yang menderita, the underdog, lepas dari kerangka PK. Lo, masak, rakyat Timtim menderita? Jujur saja jawabnya: mestinya Anda melihat sendiri dengan dua bola mata sendiri, mendengar dengan dua telinga sendiri, dan dengan hati yang beriman. Atau, mendengar sendiri kesaksian (bisik-bisik) para pegawai sipil RI yang pernah bekerja di Timtim, yang masih jujur dan bisa dipercaya, bahkan kopral atau sersan yang pernah bertempur di sana dan tidak tahan menyimpan segala beban rahasia di dalam hati lalu bercerita kepada keluarga dan tetangga, apa yang mereka lihat atau dipaksa harus dikerjakan di bawah perintah, dengan segala konflik batin yang luar biasa -- ternyata yang menderita bukan saja orang-orang Timtim, tapi juga orang-orang RI kita sendiri.

Barulah Anda akan sadar dan paham, mengapa Uskup Belo mendapat Hadiah Nobel Perdamaian. Tapi, memang, Anda harus membedakan secara eksak dan tajam antara PK dan PM tadi. Dan, merefleksi dari sudut tafsiran rakyat biasa Timtim, terutama yang dina, lemah, miskin, tak berdaya. Tapi, itu memang amat sulit -- saya tahu. Dan, dilarang.